



**PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK**

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS

PERIKANAN

Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan Hidayah-Nya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik.

Perubahan Renja ini merupakan penyesuaian terhadap Renja Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi, kebutuhan masyarakat, serta dinamika pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang direncanakan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian tujuan strategis yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.

Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025 memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2025 berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan ini disampaikan banyak terima kasih. Namun demikian masukan dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa kami harapkan.

Gresik, 23 Juli 2025
Pit. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN GRESIK



EKO ANINDITO PUTRO, M.M.A.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196609141992021002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	22
BAB IV PENUTUP.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Gresik	9
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Gresik	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Perubahan Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tata cara penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah antara lain Persiapan penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Awal Renja Perubahan Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah; dan Penetapan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Proses penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Perubahan Tahun 2025 sebagai hasil dari Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja PD yang telah disusun akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam rangka penyusunan Rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik adalah :

- a. Undang- undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- l. Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- m. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Gresik disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik sampai dengan Triwulan I tahun 2025;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kinerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- c. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perubahan Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdiri dari :

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan pada Tabel Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

BAB V. PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaannya dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, serta untuk memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Dalam rangka mendukung dan menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Gresik telah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.746.063.160,48 Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi 4 Program, 7 Kegiatan, 11 Sub Kegiatan dan Non Urusan terdiri dari 1 program, 5 kegiatan, 16 Sub kegiatan dengan realisasi Triwulan I sebesar Rp. 1.278.861.222,00 atau 13,12%.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025
Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungja wab	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8= 7		9=8/6x100		10	11
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				9.746.063.160,48	13	1.278.861.222	13	1.278.861.222	2,74	13,12		
		DINAS PERIKANAN				9.746.063.160,48	13	1.278.861.222	13	1.278.861.222	2,74	13,12		
		KELAUTAN DAN PERIKANAN				9.746.063.160,48	13	1.278.861.222	13	1.278.861.222	2,74	13,12		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.579.317.798,48	4	1.272.468.110	4	1.272.468.110	14	19,34	Sekretariat	
	Terselenggara nya administrasi Pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD	Dokume n		33.334.092		-	-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	6	29.656.992			-	-	0,00	0,00		

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungja wab	Ket.
							I							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6		7		8= 7		9=8/6x100		10	11
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	3.677.100		-	-	-	0,00	0,00		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah (bulan)			5.176.851.274,48	7	1.079.341.746	7	1.079.341.746	25,93	20,85		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		27	5.176.851.274,48	7	1.079.341.746	7	1.079.341.746	25,93	20,85		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah			280.128.059	0	2.623.050	0	2.623.050	3,13	0,94		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	9	13.188.498			-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	36	37.154.232			-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	16	10.482.432			-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	58.501.247			-	-	0,00	0,00		

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungja wab	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8= 7		9=8/6x100		10	11
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	t Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	12.610.150			-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokume n	3	2.198.400			-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	161	74.861.000			-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokume n	1	71.132.100	0,25	2.623.050	0	2.623.050	25,00	3,69		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			755.768.500	9	178.503.314	9	178.503.314	25,00	23,62		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	86.424.500	3	15.779.324	3	15.779.324	25,00	18,26		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		22	669.344.000	5,5	162.723.990	5,5	162.723.990	25,00	24,31		

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungja wab	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8= 7		9=8/6x100		10	11
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			333.235.873	2	12.000.000	2	12.000.000	14,375	3,60		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	40.753.860	0,25	7.500.000	0	7.500.000	25,00	18,40		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	51.533.660	1	4.500.000	1	4.500.000	12,50	8,73		
		Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	227.990.353			-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	12.958.000	1		1	-	20,00	0,00		
Rata - rata capaian kinerja (%)											13,69	9,80		
Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungja wab	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8= 7		9=8/6x100		10	11
	Meningkatny a Produksi dan produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap(ton)			645.336.593		-	-	-	0,00	0,00	Bidang Perikanan Tangkap	
		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap (Paket)		0	366.620.350		-	-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data Base	Paket	4	37.471.550		-	-	-	0	0,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	paket	1	329.148.800		-	-	-	0,00	0,00		
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				206.038.818		-	-		0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah peserta,pelatihan teknis penangkapan ikan (orang)	Orang	120	171.151.100		-	-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah peserta,pelatihan teknis penangkapan ikan (orang)	Kelompo k	1	34.887.718		-	-	-	0,00	0,00		

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungja wab	Ket.
							I							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8= 7		9=8/6x100		10	11
		Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	peningkatan Jumlah TPI yang beroperasi dengan baik (%)			72.677.425		-	-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah peserta pembinaan teknis	Orang	6	72.677.425		-	-	-	0,00	0,00		
0											0	0,00		
Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Meningkatny a Produksi dan produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)			1.150.222.394		-	-	-	0,00	0,00	Bidang Perikanan Budidaya	
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana budidaya (Paket)			960.784.450		-	-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis	Orang	10	935.718.600		-	-	-	0,0	0,00		

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungja wab	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8= 7		9=8/6x100		10	11
		Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis (orang)	Orang	10	25.065.850		-	-	-	0,00	0,00		
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Jumlah Pembudidaya ikan yang dibina (orang)			189.437.944		-	-	-		0,00		
		Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pembinaan (orang)		3	50.822.000		-	-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan (orang)		1	19.158.450		-	-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis (orang) / Demp. Percontohan (unit)		100	94.498.044		-	-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)		1	24.959.450		-	-	-	0	0,00		

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungja wab	Ket.
							I							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8= 7		9=8/6x100		10	11
Rata - rata capaian kinerja (%)											0,00	0,00		
Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya kelautan,perikanan secara optimal terkendali dan berkelanjutan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pengawasan usaha perikanan			171.978.986		-	32	-	-	0,00	Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan	
		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Konflik Pelaku usaha perikanan yang melanggar ketentuan perundangan			171.978.986		-	-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis orang		10	84.003.996		-	-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)		10	87.974.990		-	-	-	0,00	0,00		

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungja wab	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8= 7		9=8/6x100		10	11
Rata - rata capaian kinerja (%)											0,00	0,00		
Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Tercapainya kecukupan Gizi dari protein hewani masyarakat dari hasil perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan			1.199.207.389		6.393.112		6.393.112	10,00	0,14	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Presentase Tingkat konsumsi ikan						-	-				
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan Jumlah kelompok pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan			26.302.600	-	-	-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Data base data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (paket	Dokume n	30	26.302.600	-	-	-	-	0,00	0,00		

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungja wab	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8= 7		9=8/6x100		10	11
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Olahan hasil Perikanan (ton)			1.172.904.789	20	6.393.112	20,00 0	6.393.112	20,00	0,29		
		Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Ikan(ton)		200.0 00	62.832.600		-	-	-	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan teknis (Kelompok)		50	1.110.072.189	20	6.393.112	20	6.393.112	40,00	0,58		
Rata - rata capaian kinerja (%)											0,00	0,00		
Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program						9.746.063.160		1.278.861.222		1.278.861.222				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											2,74	13,12		
Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian surat rekomendasi untuk pembelian BBM bersubsidi bagi pelaku usaha perikanan. Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Dinas Perikanan Kabupaten Gresik sudah menerbitkan surat rekomendasi sebanyak 121 surat.

Pelayanan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pada Tahun 2025 selama Triwulan I ada pengajuan uji kualitas air sebanyak 5 (lima) sampel yang telah diajukan oleh Pembudidaya Ikan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik maka tugas pokok yang diemban Dinas Perikanan Kabupaten Gresik adalah :

“ Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perikanan “

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan program urusan perikanan
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan perikanan
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi urusan perikanan
- d. Pelaksanaan pengendalian kebijakan urusan perikanan
- e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan perikanan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan perikanan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Isu dan Permasalahan

Dalam rangka pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan disamping mempunyai peluang yang menjanjikan juga dihadapkan pada berbagai macam permasalahan sekaligus tantangan yang harus dihadapi. Permasalahan tersebut diantaranya:

1. Harga pakan yang berkualitas cenderung naik
2. Upaya peralihan penggunaan obat-obatan yang disarankan sesuai CBIB
3. Terbatasnya benih yang berkualitas dan kurangnya penyediaan induk berkualitas
4. Kurangnya teknologi budidaya/perbenihan untuk komoditas yang sedang dan akan dikembangkan
5. Alat tangkap nelayan yang masih tradisional dengan kemampuan one day fishing
6. Peningkatan kualitas garam untuk garam industri
7. Sumberdaya Manusia pengolah hasil perikanan masih rendah, berskala kecil, tradisional
8. Masih kurangnya pengetahuan nelayan
9. Peningkatan dan pembinaan kelompok masyarakat pengawasan
10. Menurunnya mutu lahan budidaya akibat cara budidaya yang tidak baik dan benar dan penggunaan obat-obatan terlarang
11. Pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan untuk penanganan konflik wilayah, baik antar wilayah maupun pengguna jasa kelautan/pesisir
12. Jaminan mutu produk perikanan olahan dengan daya beli masyarakat belum sesuai
13. Pemasaran produk perikanan kurang efisien
14. Penanganan hasil tangkapan ikan di atas kapal masih tradisional
15. Pengolahan hasil penangkapan masih tradisional
16. Kurangnya penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System dan Catch Certificate (Sertifikasi Hasil Tangkap)
17. Persyaratan Ekspor dan Keterbatasan bahan baku
18. Kurangnya respon terhadap komitmen dan Program Minapolitan
19. Rusaknya ekosistem mangrove di beberapa tempat di Kab. Gresik akibat penebangan liar
20. Penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti minitrawl
21. Akibat perubahan cuaca ekstrim banyak nelayan tidak melaut sehingga mempengaruhi pendapatan nelayan
22. Identifikasi biodiversivitas wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Table 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6-8	10
		DINAS PERIKANAN			15.398.527.683,00	9.746.063.160,48	9.322.933.803,48	-6.075.593.879,52	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			15.398.527.683,00	9.746.063.160,48	9.322.933.803,48	-6.075.593.879,52	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			15.398.527.683,00	9.746.063.160,48	9.322.933.803,48	-6.075.593.879,52	
1,	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.802.643.321,00	6.579.317.798,48	6.477.413.860,48	-6.802.643.321,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	33.376.842,00	33.334.092,00	20.239.819,00	-13.137.023,00	
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			6 Dokumen	6 Dokumen	29.654.727,00	29.656.992,00	17.076.994,00	-12.577.733,00	PAJAK DAERAH
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			8 Laporan	8 Laporan	3.722.115,00	3.677.100,00	3.162.825,00	-559.290,00	PAJAK DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6-8	10
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.417.694.797,00	5.176.851.274,48	5.176.851.274,48	-240.843.522,52	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			27 Orang/b ulan	27 Orang/b ulan	5.417.694.797,00	5.176.851.274,48	5.176.851.274,48	-240.843.522,52	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	316.376.159,00	280.128.059,00	204.491.794,00	-111.884.365,00	
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			9 Paket	9 Paket	13.188.498,00	13.188.498,00	13.188.498,00	0,00	PAJAK DAERAH
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			36 Paket	36 Paket	36.861.032,00	37.154.232,00	27.154.232,00	-9.706.800,00	PAJAK DAERAH
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			16 Paket	16 Paket	10.482.432,00	10.482.432,00	9.609.472,00	-872.960,00	PAJAK DAERAH
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			12 Paket	12 Paket	58.501.247,00	58.501.247,00	35.100.747,00	-23.400.500,00	PAJAK DAERAH
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
			6 Paket	6 Paket	12.610.150,00	12.610.150,00	8.878.345,00	-3.731.805,00	PAJAK DAERAH
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			3 Dokumen	3 Dokumen	4.611.600,00	2.198.400,00	2.198.400,00	-2.413.200,00	PAJAK DAERAH
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			161 Laporan	161 Laporan	74.861.000,00	74.861.000,00	37.230.000,00	-37.631.000,00	PAJAK DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6-8	10
	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
			1 Dokumen	1 Dokumen	105.260.200,00	71.132.100,00	71.132.100,00	-34.128.100,00	PAJAK DAERAH
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	755.768.500,00	755.768.500,00	752.968.500,00	-2.800.000,00	
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			12 Laporan	12 Laporan	86.424.500,00	86.424.500,00	86.424.500,00	0,00	PAJAK DAERAH
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			22 Laporan	22 Laporan	669.344.000,00	669.344.000,00	666.544.000,00	-2.800.000,00	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	279.427.023,00	333.235.873,00	322.862.473,00	43.435.450,00	
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			1 Unit	1 Unit	40.753.860,00	40.753.860,00	40.753.860,00	0,00	PAJAK DAERAH
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			8 Unit	8 Unit	51.533.660,00	51.533.660,00	51.533.660,00	0,00	PAJAK DAERAH
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			1 Unit	1 Unit	174.107.253,00	227.990.353,00	217.616.953,00	43.509.700,00	PAJAK DAERAH
	3.25.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			5 Unit	5 Unit	13.032.250,00	12.958.000,00	12.958.000,00	-74.250,00	PAJAK DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6-8	10
2,	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	1.930.336.593,00	645.336.593,00	537.494.441,00	-1.930.336.593,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	954.310.235,00	366.620.350,00	318.540.375,00	-635.769.860,00	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan							
			4 Dokumen	4 Dokumen	104.924.020,00	37.471.550,00	19.497.375,00	-85.426.645,00	PAJAK DAERAH
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap							
			30 0	30 0	849.386.215,00	329.148.800,00	299.043.000,00	-550.343.215,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap							
			30 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	46.634.333,00	206.038.818,00	173.059.548,00	126.425.215,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil							
			120 Orang	120 Orang	46.052.400,00	171.151.100,00	147.932.070,00	101.879.670,00	PAJAK DAERAH DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT)
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil							
			1 Kelompok	1 Kelompok	73.571,00	34.887.718,00	25.127.478,00	25.053.907,00	PAJAK DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6-8	10
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha							
			1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	508.362,00	0,00	0,00	-508.362,00	-
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	929.392.025,00	72.677.425,00	45.894.518,00	-883.497.507,00	
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)							
			6 Layanan	6 Layanan	929.392.025,00	72.677.425,00	45.894.518,00	-883.497.507,00	PAJAK DAERAH
3,	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	5.484.361.394,00	1.150.222.394,00	1.034.676.544,00	-5.484.361.394,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	1.435.784.450,00	960.784.450,00	940.662.225,00	-495.122.225,00	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil							
			10 Kelompok	10 Kelompok	1.410.718.600,00	935.718.600,00	924.669.300,00	-486.049.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan							
			10 Kelompok	10 Kelompok	25.065.850,00	25.065.850,00	15.992.925,00	-9.072.925,00	PAJAK DAERAH
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	4.048.576.944,00	189.437.944,00	94.014.319,00	-3.954.562.625,00	
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			1 Dokumen	1 Dokumen	19.158.450,00	19.158.450,00	12.918.225,00	-6.240.225,00	PAJAK DAERAH
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			3 Unit	3 Unit	3.467.156.504,00	50.822.000,00	38.757.000,00	-3.428.399.504,00	PAJAK DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6-8	10
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat							
			100 Unit	100 Unit	537.302.540,00	94.498.044,00	26.419.644,00	-510.882.896,00	PAJAK DAERAH
	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat							
			1 Unit	1 Unit	24.959.450,00	24.959.450,00	15.919.450,00	-9.040.000,00	PAJAK DAERAH
4,	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	381.978.986,00	171.978.986,00	121.380.180,00	-381.978.986,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-	381.978.986,00	171.978.986,00	121.380.180,00	-260.598.806,00	
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota							
			20 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	177.974.990,00	87.974.990,00	64.561.310,00	-113.413.680,00	PAJAK DAERAH
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota							
			20 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	204.003.996,00	84.003.996,00	56.818.870,00	-147.185.126,00	PAJAK DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6-8	10
5,	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	799.207.389,00	1.199.207.389,00	1.151.968.778,00	-799.207.389,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	80.160.000,00	26.302.600,00	17.886.300,00	-62.273.700,00	
	3.25.06.2.01.0002	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri							
			30 Dokumen	30 Dokumen	80.160.000,00	26.302.600,00	17.886.300,00	-62.273.700,00	PAJAK DAERAH
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	223343552 Ton 2 Ton 50 Pelaku Usaha	719.047.389,00	1.172.904.789,00	1.134.082.478,00	415.035.089,00	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			200000 Ton	200000 Ton	128.879.189,00	62.832.600,00	41.376.600,00	-87.502.589,00	PAJAK DAERAH
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			150 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	590.168.200,00	1.110.072.189,00	1.092.705.878,00	502.537.678,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH
	J U M L A H				15.398.527.683,00	9.746.063.160,48	9.322.933.803,48	305.412.754.162,45	

BAB IV

P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang - undang Nomor 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2025 selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2025 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan Tahun 2025;
3. Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Tahun 2025;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini akan dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam renja ini.